

KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI (BASED POLICY EVIDENCE) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA MAKASSAR

(Studi Kasus Pada BAPPEDA Kota Makassar)

Viqra Ramadanti

Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, 2019

Abstract: *This study aims to determine whether Evidence-based policies have been applied in development planning in Makassar City. This type of research is descriptive qualitative research with data collection techniques, namely interviews, observation, and documentation. Informants in this study are all important elements that are in the Makassar City Development Planning Board and community leaders in the city of Makassar. Determination of informants in this study using purposive sampling technique. Data analysis techniques using data reduction, data display, and drawing conclusions. The results of the study show that development planning in Makassar City has been running according to Evidence Based Policy. This is based on the evaluation of an appropriate program, the development of a good budget, the implementation of good supervision, the results of monitoring that have been achieved, and the targeted evaluation that has been achieved.*

Keywords: *Evidence Based Policy, Development Planning, Regional Development Planning*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan Berbasis Bukti telah diterapkan dalam perencanaan pembangunan di Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini yaitu seluruh unsur penting yang berada di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Makassar dan tokoh masyarakat Kota Makassar. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive Sampling. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di Kota Makassar telah berjalan sesuai Kebijakan Berbasis Bukti. Hal ini didasari atas penilaian program yang telah sesuai, pengembangan anggaran yang sudah baik, pelaksanaan pengawasan yang sudah baik, hasil pemantauan yang sudah tercapai, serta evaluasi yang ditargetkan telah tercapai.*

Kata Kunci: *Kebijakan Berbasis Bukti, Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Pembangunan daerah*

PENDAHULUAN

Kesejahteraan rakyat bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan melalui perencanaan pembangunan yang merupakan satu-satunya jalan terbuka bagi negara terbelakang. Menurut PP Nomor 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan PP Nomor 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional menekankan pada perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja yang secara mekanismenya dalam meningkatkan manfaat sumber daya yang dianggarkan ke sektor publik dengan memperhatikan hasil yang ingin dicapai. Perencanaan berbasis kinerja merupakan sebuah pendekatan dalam sistem perencanaan yang memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pembangunan dengan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Untuk mendukung perencanaan berbasis kinerja perencanaan pembangunan akan lebih efektif apabila menggunakan pendekatan ilmiah sehingga dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan yang diperlukan. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan perencanaan yang memprasyaratkan survei yang menyeluruh terhadap sumber potensial yang ada di suatu Negara. Hal ini sangat penting mengingat pemerintah daerah harus mampu dan bertanggung jawab atas kebutuhan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Penerapan kebijakan berbasis bukti dalam sistem perencanaan pembangunan terkhususnya di Indonesia merupakan hal yang baru dan sangat penting. Sudarno (2018) menjelaskan bahwa Kebijakan berbasis bukti sangat perlu dikarenakan dapat dilihat dari segi efektivitas, efisiensi, orientasi layanan publik, akuntabilitas, demokrasi dan kepercayaan. Analisis berbasis bukti yang sistematis merupakan unsur yang sangat penting dalam semua pembuatan perencanaan yang baik. Berbagai data perlu dilakukan guna menghasilkan analisis dan bukti yang diperlukan pemerintah untuk memahami dengan benar apakah kebijakan mencapai sasarannya, berjalan sesuai dengan rencana, dan apakah pelayanan telah diberikan secara efektif. Sehingga, bukti seharusnya digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimana setiap daerah diberikan wewenang untuk membuat dan mengatur kebijakan daerah untuk peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, demi tercapainya salah satu tujuan negara yaitu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pelaksanaan pembangunan setiap tahun adanya penyusunan dokumen perencanaan dalam setiap daerah. Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka perwujudan tujuan daerah dan tujuan nasional. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, maka pengelolaannya harus dilakukan secara terarah dan terpadu dengan pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar merupakan dokumen induk yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar kemudian dijabarkan di dalam rencana pembangunan tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (Renja) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) setiap tahunnya. Untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional berbasis kinerja dengan memperhatikan hasil yang di harapkan maka perencanaan harus di dukung oleh data atau bukti yang relevan.

Dalam setiap kegiatan perencanaan, harus selalu diikuti dengan penganggaran. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian, serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Makassar tingkat pertumbuhan belanja daerah baik belanja langsung maupun tidak langsung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kenaikan jumlah anggaran belanja daerah Kota Makassar dapat terjadi karena adanya perkembangan ekonomi daerah. Berdasarkan teori model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar semakin meningkat. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya perbaikan dalam sistem perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan daerah di Kota Makassar. Berdasarkan revisi RPJMD Kota Makassar tahun 2014-2019, perencanaan pembangunan daerah diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur).

Untuk bisa menghantar jasa publik secara optimal yang sesuai dengan sasaran program perencanaan Kota Makassar tahun 2014-2019, diperlukan penerapan perencanaan berbasis data lewat integrasi antara sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring-evaluasi. Dalam penyusunan dokumen perencanaan ini melalui tahapan monitoring dan evaluasi agar dapat memenuhi pencapaian target yang sesuai dengan sasaran program perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pentingnya kebijakan berbasis bukti dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran dalam setiap program pembangunan daerah Kota Makassar sehingga mampu mengidentifikasi permintaan jasa publik lokal dan pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/ penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat, baik yang dilakukan secara konseptual/dokumentasi maupun eksperimental. Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan diatas meja, tanpa melihat realita dilapangan. Data-data real lapangan sebagai data primer merupakan hal-hal penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan pentingnya penerapan kebijakan berbasis bukti dalam perencanaan pembangunan di Kota Makassar untuk terlebih dahulu mengidentifikasi kebijakan dan program yang sesuai dengan masalah atau fakta yang terjadi sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran. Untuk itu rumusan masalah yang diteliti adalah apakah perencanaan

pembangunan di Kota Makassar telah menerapkan perencanaan berbasis bukti?. Setelah penelitian ini dilakukan dapat memberikan gambaran untuk mengetahui apakah kebijakan berbasis bukti telah diterapkan dalam perencanaan pembangunan di Kota Makassar.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Berbasis Bukti.

Kebijakan berbasis bukti menggunakan penelitian dan informasi terbaik yang tersedia mengenai hasil program untuk membuat keputusan di semua tahapan proses kebijakan dan di setiap cabang pemerintahan. Perkembangan kebijakan yang terjadi pada berbagai tahap dan meluas dari waktu ke waktu untuk merespon dan mengatasi masalah yang ada. Menurut Sanderson (2002) bahwa penekanan lebih harus diberikan pada pengembangan basis bukti yang kuat untuk kebijakan melalui evaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan dan program. Menurut Krizek (2010) praktik berbasis bukti mengusulkan hubungan yang lebih baik antara penelitian dan pengambil kebijakan, tetapi menimbulkan beberapa kekhawatiran tentang jenis bukti, kekuatan dan kejelasan penelitian dalam perencanaan, dan ketidaksetaraan sumber daya untuk mengintegrasikan penelitian ke dalam perencanaan.

Selain beberapa teori tersebut diatas kebijakan berdasarkan teori rasional memandang sebagai pencapaian tujuan serta efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap. Teori ini menunjukkan bahwa kebijakan merupakan suatu cara atau program yang dibuat dalam mencapai suatu tujuan tertentu dan efisien dalam pengambilan suatu kebijakan agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan rencana. Sementara itu teori Lasswel dalam ilmu kebijakan publik mencakup metode penelitian proses kebijakan, hasil dari studi kebijakan, dan hasil temuan penelitian yang memberikan kontribusi paling penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan intelegensi era kita sekarang. Teori ini mendorong untuk agar dalam perumusan kebijakaan harus dianalisa dan mampu mengidentifikasi masalah-masalah kebijakan karena pada dasarnya kebijakan harus berorientasi pada masalah yang terjadi dan berkembang.

2. Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah.

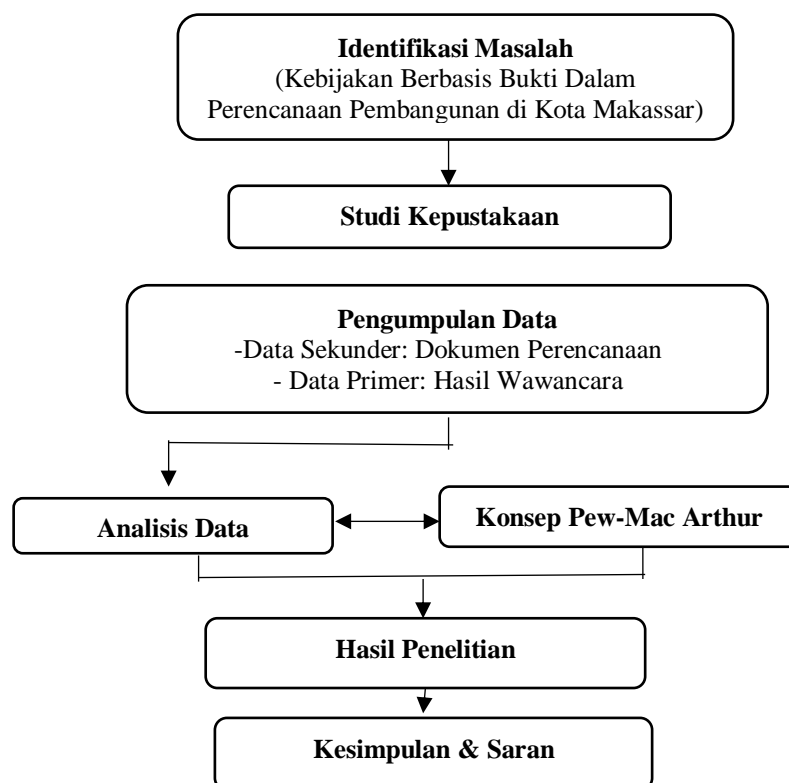
Perencanaan pembangunan daerah dapat diartikan sebagai upaya menghubungkan pengetahuan atau teknik yang dilandasi kaidah-kaidah ilmiah ke dalam praktik-praktik yang dilandasai oleh teori dalam perspektif kepentingan orang banyak atau publik. Perencanaan pembangunan adalah suatu usaha pemerintah untuk mengkoordinasikan semua keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung serta mengendalikan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi yang penting. Perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk mencapai setiap sasaran dan tujuan pembangunan pada dasarnya disusun oleh pemerintah melalui badan perencanaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa esensi dari perencanaan pembangunan merupakan kegiatan dalam menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan berbagai metode dan alur kegiatan yang

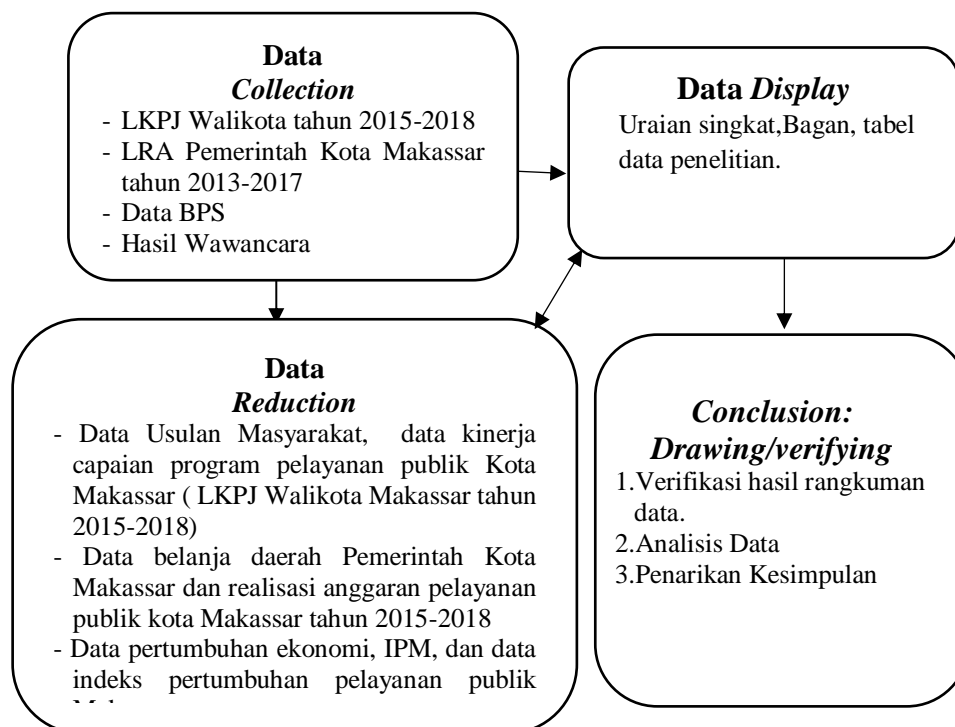
sistematis dengan melihat kualitas sumber daya alam yang dimiliki. Berdasarkan pengertian tersebut, Setianingsih (1996) menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari dua aspek penting, yaitu merupakan kegiatan perumusan rancangan pembangunan dan sebagai proses yang akan menentukan keberhasilan pembangunan. Menurut konsep Riyadi (2004) perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik dalam rangka mencapai suatu tujuan. Berdasarkan konsep tersebut menjelaskan bahwa perencanaan berbasis bukti memang sangat penting adanya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Sedangkan teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan Model Interaktif Analisis Data Miles, Huberman dan Saldana yang dapat digambarkan sebagai berikut:



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari data-data yang telah diperoleh dan telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan, kemudian akan dibahas sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, variabel penelitian yang akan dibahas yaitu kebijakan berbasis bukti dalam perencanaan pembangunan yang terdiri dari empat indikator yaitu penilaian program, pengembangan anggaran, pelaksanaan pengawasan, hasil pemantauan, dan evaluasi yang ditargetkan. Pembahasan hasil penelitian ini merupakan interpretasi atau penggambaran hasil penelitian yang ditemukan di lapangan dan penafsiran terhadap hasil akhir dalam melakukan pengujian data dengan konsep para ahli, dan teori sehingga mengembangkan teori serta mendeskripsikan hasil data penelitian dan fakta di lapangan, penelitian ini menghubungkan temuan hasil penelitian dengan indikator yang telah ditetapkan dalam hal ini konsep Pew Machtur. Setelah melakukan beberapa peninjauan secara ilmiah dan sistematis, Kebijakan Berbasis Bukti (*Based Policy Evidence*) dalam Perencanaan Pembangunan Kota Makassar, maka diperoleh beberapa informasi sebagai berikut:

1. Penilaian Program.

Dalam Konsep Pew-Mac Arthur penilaian program dalam perencanaan berbasis bukti dengan berusaha mengidentifikasi program yang efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan dari kebijakan. Selain itu, penilaian program dilaksanakan untuk menilai bagaimana dampak yang akan dicapai dalam suatu program. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat dilihat bahwa

penyusunan program perencanaan pembangunan sendiri dilakukan dari tingkat bawah yaitu mulai dari Musrembang tingkat Kelurahan hingga Kabupaten atau Kota. Hal ini bertujuan untuk agar pemerintah dapat mendengarkan semua aspirasi masyarakat demi terwujudnya tujuan dari pembangunan itu sendiri yaitu kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam proses penyusunan dan perumusan program perencanaan pembangunan harus dilakukan berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang ada sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah masyarakat. Program perencanaan pembangunan juga harus dinilai dari segi efisien dan efektif dari program pembangunan tersebut agar tujuan dan sasaran dapat tercapai.

2. Pengembangan Anggaran.

Dalam konsep Pew-Mac Arthur menjelaskan bahwa agar pembuatan Anggaran pembuatan kebijakan berbasis bukti berhasil, pemerintah harus secara sistematis menggunakan bukti keefektifan program untuk menginformasikan proses mereka untuk membuat anggaran dan keputusan kebijakan. Oleh karena itu dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran harus sesuai dengan data-data dan bukti yang ada. Dengan melihat ketersediaan anggaran yang ada pelaksanaan program pembangunan yang ada dapat membuat proses pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan dengan efisien dan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin di capai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan unsur-unsur penting dalam wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar menjelaskan bahwa penyusunan dan penetapan anggaran berdasarkan sistem yang sudah ada. Hal ini dilakukan agar perencanaan sesuai dengan data-data yang ada berupa data kondisi anggaran pemerintah daerah Kota Makassar agar perencanaan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Akan tetapi, hal ini tidak membuat proses pembangunan dibatasi oleh ketersediaan anggaran yang ada. Oleh karena itu sebelumnya terlebih dahulu dilakukan penilaian program untuk melihat program yang dapat diprioritaskan terlebih dahulu dalam perencanaan pembangunan. Program pelayanan dasar dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mendapatkan perhatian yang lebih yaitu menjadi program prioritas pemerintah daerah setiap tahunnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan peningkatan anggaran untuk program pelayanan dasar yang meningkat setiap tahunnya. Pelayanan dasar sebagai program prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Makassar merupakan hasil dari penilaian program berdasarkan bukti keefektifan dan keefisienannya dan dengan melihat kondisi anggaran yang sesuai dengan program yang akan dilaksanakan.

3. Pelaksanaan Pengawasan

Dalam konsep Pew-Mac Arthur untuk memastikan bahwa program pembangunan berjalan sesuai dengan apa yang telah disusun dan dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah maka perlu harus diadakannya pelaksanaan pengawasan yang kuat baik itu dalam lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaan pengawasan semua

elemen harus terlibat di dalamnya untuk mencapai sasaran dan tujuan dari program perencanaan pembangunan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa pelaksanaan pengawasan dalam perencanaan pembangunan di Kota Makassar dilakukan oleh semua unsur baik dalam wilayah pemerintah maupun masyarakat umumnya. Bentuk pelaksanaan pengawasan program perencanaan pembangunan daerah di Kota Makassar dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan pengawasan secara langsung dapat dilakukan dengan memantau langsung proses pelaksanaan program pembangunan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat monitoring dan evaluasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan masing-masing program.

4. Hasil Pemantauan

Dalam kosep Pew-Mac Arthur menjelaskan bahwa kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program pembangunan pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui sampai dimana program tersebut telah dilaksanakan dan persoalan-persoalan apa saja saja yang dirasakan dalam pelaksanaan program tersebut. Oleh sebab itu, kegiatan monitoring ini sebenarnya merupakan kegiatan mengikuti jalannya pelaksanaan program agar sesuai dengan tujuan dan sasarn yang dicapai dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat dilihat bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar berusaha untuk mencapai target yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan yang telah kita buat. Untuk mencapai target yang telah ditentukan itu dilakukan evaluasi agar perencanaan yang telah dirumuskan tidak keluar dari rencana yang telah dibuat. Hasil dari laporan program kegiatan tertuang dalam laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

5. Evaluasi yang Ditargetkan

Menurut konsep Pew-Mac Arhur menjelaskan bahwa melakukan evaluasi yang ketat terhadap program perencanaan untuk memastikan bahwa mereka menjamin terus pelaksanaan program kegiatan perencanaan. Program dengan sedikit bukti atau informasi dapat membawa risiko yang lebih tinggi terhadap hasil program yang rendah. Oleh karena itu, perlu adanya untuk mengevaluasi langsung pelaksanaan program yang telah berjalan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan target sasaran dan tentunya untuk perencanaan selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan perencanaan pembangunan daerah di Kota Makassar ditemukan beberapa kendala yaitu seperti masalah data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar yang tidak update, hal ini membuat perencanaan tidak didukung oleh penyiapan data. Selain itu, permasalahan yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan Kota

Makassar juga dari sisi kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang perencanaan yang kurang baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar melakukan proyeksi dengan metode dan ahli yang bisa dipertanggung jawabkan dengan memanfaatkan data keilmuan seperti penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Sedangkan, untuk permasalahan kualitas Sumber Daya Manusia dalam perencanaan pembangunan di Kota Makassar pemerintah terus melakukan pelatihan-pelatihan atau Diklat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Kebijakan Berbasis Bukti dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Makassar. Ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam penelitian yaitu:

1. Penilaian program yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar yang terkait dalam proses perencanaan telah menyusun dan merumuskan program perencanaan pembangunan berdasarkan hasil data dan bukti di lapangan dengan melakukan perencanaan dengan pendekatan *bottom-up* sehingga masyarakat bukan hanya sebagai obyek dari perencanaan tetapi juga sebagai subjek dari perencanaan itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk agar pemerintah dapat mendengar seluruh aspirasi masyarakat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat untuk mewujudkan salah satu tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat.
2. Pengembangan Anggaran yang dilakukan dalam proses perencanaan pembangunan di Kota Makassar berdasarkan sistem yang telah dibuat berdasarkan sistem yang telah dibuat yang disebut SIADINDA (Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah) oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang memiliki kewenangan dalam penyusunan dan penetapan anggaran. Hal ini bertujuan untuk agar program perencanaan pembangunan daerah tidak dibuat berdasarkan kepentingan daerah. Meskipun, dalam proses perencanaan pembangunan berdasarkan sistem yang telah dibuat akan tetapi pemerintah juga berdasarkan penilaian program melihat program mana yang menjadi program prioritas dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang telah ditetapkan.
3. Pelaksanaan Pengawasan dalam proses pelaksanaan program pembangunan di Kota Makassar telah dilakukan dengan memanfaatkan semua unsur yang ada baik dari lembaga pemerintahan maupun masyarakat umumnya. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dalam dua bentuk yaitu secara langsung dengan turun secara langsung di lapangan memantau proses pelaksanaan program kegiatan dan tidak langsung dengan melakukan rapat monitoring dan evaluasi program perencanaan.
4. Hasil Pemantauan program perencanaan pembangunan di Kota Makassar diharapkan mampu berjalan sesuai dengan sasaran target yang telah ditetapkan. Hal ini juga untuk menilai keberhasilan pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah. Segi hasil tercapainya tujuan pemerintah pemerintah menjadi sasaran utama di dalam hasil pemantauan ini.

5. Evaluasi yang Ditargetkan dalam perencanaan pembangunan Kota Makassar bertujuan untuk melihat hasil pelaksanaan program perencanaan pembangunan telah berjalan sesuai dengan apa yang telah disusun dan dirumuskan dalam program pembangunan. Hal ini bertujuan untuk melihat dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perencanaan pembangunan di Kota Makassar untuk pelaksanaan program pembangunan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, W.W., Mujibur, R.K.M, & Ratih,N. (2012). *Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan*. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 15, No.3. Universitas Brawijaya Malang
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (Agustus, 2019). *Kerangka Pemikiran Reformasi Perencanaan dan Penganggaran*. Dikutip 17 September 2019 dari <http://bappenas.go.id>
- Childa K, Brilianto,dkk. (2018, Maret). *Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti (Panduan Untuk Pemerintahan yang Efektif)*. Dikutip 3 Maret 2019 dari [blog:ub.ac.id](http://blog.ub.ac.id)
- Sanderson Ian. (2002). *Evaluation Policy Learning and Evidence-Based Policy Making*
- Setianingsih, B., Setyowati, E., & Siswidiyanto. (2015). *Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDAs)*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No. 11, Hal. 1930-1936.
- Sirajuddin , A. I. (2014). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4, No. 1.
- Wahab, Solichin Abdul. (2008). *Analisis Kebijaksanaan : dari formulasi ke implemementasi kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Yuliarti, Amar Syamsul, & Idris. (2015). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta di Indonesia*. Dikutip 27 Juni 2019 dari <https://media.neliti.com>